

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Lembaga Keuangan Mikro memiliki peran penting dalam pembangunan sektor keuangan dan ekonomi terutama untuk skala kecil pada bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada perkembangan UMKM mendorong dengan peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang berkontribusi mengurangi nilai pengangguran di Indonesia. Kabupaten Jepara, sebagai salah satu kota yang memiliki bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang furniture dan mebel tentunya, merupakan kekuatan strategis yang penting dalam pembangunan ekonomi Daerah. Industri Kecil Menengah memiliki peran penting dalam penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan (Kuncoro, 2007).

Bertambahnya jumlah UMKM di Indonesia khususnya Kota Jepara tidak terlepas dari peran permodalan yang kebanyakan didapat dari PEMBAYARAN PINJAMAN LKM. Pemerintah Indonesia telah menyediakan fasilitas PEMBAYARAN PINJAMAN UMKM melalui program Pinjaman Usaha Rakyat (KUR) yang dirasa mampu memenuhi kebutuhan UMKM khususnya di Jepara karena jumlah plafon yang ditawarkan cukup tinggi dengan bunga pinjaman yang terbilang rendah, dengan niat meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan untuk bisnis UMKM. Namun kenyataan yang ada tidak semua UMKM merasakan penyaluran KUR tersebut dengan alasan jarak serta prosedur yang dirasa rumit bagi pemilik UMKM.

Secara umum kendala UMKM dalam mengakses perbankan yang disediakan pemerintah seperti KUR karena masalah administrasi, pihak pemberi PEMBAYARAN PINJAMAN akan meminta kelengkapan administrasi kepada UMKM sedangkan pembuatan laporan keuangan oleh UMKM merupakan hal yang sulit bagi UMKM karena kurangnya literasi keuangan pemilik UMKM yang meliputi kemampuan dan pengetahuan UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan serta mengelola hutang, sedangkan LKM mendorong pelanggan untuk mendapatkan akses mudah sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan UMKM tersebut, situasi ini memperkuat pemikiran bahwa tidak banyak UMKM yang menggunakan prosedur pembukuan yang baik dalam menjalankan bisnisnya.

Dalam penelitian Musabwasoni (2018) , lebih dari 28 LKM ditutup karena pinjaman yang buruk dan manajemen aset.SACCO Umurenge bukan pengecualian. Dengan kata lain, mereka menghadapi tantangan besar, yaitu pembayaran pinjaman.

Hal ini menimbulkan lebih banyak tantangan, khususnya untuk manajemen hutang, perencanaan masa depan atau penganggaran, tabungan dan pembukuan. Sebuah UMKM yang tidak memiliki literasi keuangan akan menimbulkan masalah pinjaman macet jika menerima pembayaran pinjaman dari pihak perbankan karena tidak adanya pencatatan ataupun perhitungan terhadap laba. Keterampilan manajemen pinjaman diperoleh melalui program literasi keuangan meningkatkan kinerja melalui perolehan pembayaran pinjaman dan pengelolaan portofolio pinjaman untuk memastikan bahwa kewajiban pinjaman diminimalkan dan biaya bunga diminimalkan(Seikei, 2013).

Seperti yang ditunjukkan oleh Calcagno dan Monticone (2015), orang yang melek finansial mampu merencanakan atau menganggarkan, mereka setidaknya memiliki jejak kegiatan keuangan mereka karena pembukuan mereka, mereka mampu mengelola hutang untuk menghindari pinjaman macet dan mencegah tidak membayar kembali pinjaman.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut dan dengan objek yang berbeda dengan judul **Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap PEMBAYARAN PINJAMAN Pada UMKM (Studi Pada UJKS Mitra Usaha UNISNU Jepara).**

## **1.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki apakah literasi pembukuan, literasi penggaran, dan literasi manajemen pinjamandapat lebih berhasil dalam membantu nasabah penerima manfaat pinjaman dari LKM sehingga dapat membayar tepat waktupinjaman yang mereka ambil dari LKM. Secara geografis penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jepara dengan populasi nasabah dari beberapa LKM yang berdiri di Kabupaten Jepara .

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang ada yaitu:

1. Apakah literasi pembukuan berpengaruh positif terhadap pembayaran pinjaman pada UMKM?
2. Apakah literasi penganggaran berpengaruh positif terhadap pembayaran pinjaman pada UMKM?
3. Apakah literasi manajemen pinjaman berpengaruh positif terhadap pembayaran pinjaman pada UMKM?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

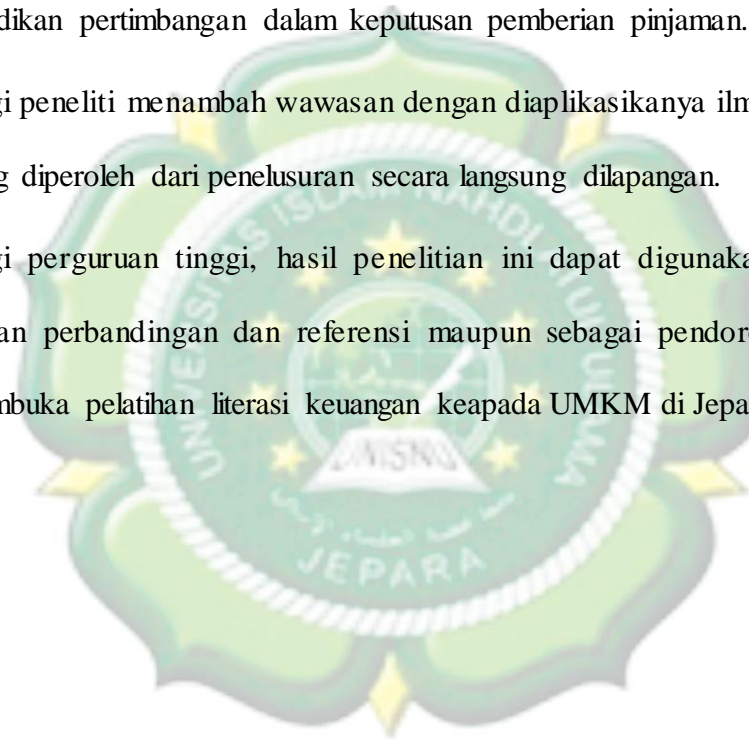
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah literasi pembukuan berpengaruh positif terhadap pembayaran pinjaman pada UMKM.
2. Untuk mengetahui apakah literasi penganggaran berpengaruh positif terhadap pembayaran pinjaman pada UMKM.
3. Untuk mengetahui apakah literasi manajemen pinjaman berpengaruh positif terhadap pembayaran pinjaman pada UMKM.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemilik Industri, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan usaha.
2. Bagi Objek penelitian, agar literasi keuangan calon nasabah dapat dijadikan pertimbangan dalam keputusan pemberian pinjaman.
3. Bagi peneliti menambah wawasan dengan diaplikasikannya ilmu tersebut yang diperoleh dari penelusuran secara langsung di lapangan.
4. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi maupun sebagai pendorong untuk membuka pelatihan literasi keuangan kepada UMKM di Jepara.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1.Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1. Pengertian LKM**

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama bentuk asset keuangan (*financial asset*) atau tagihan (*claims*, seperti saham dan obligasi. Menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan membiayai investasi perusahaan (Sumitra, 2009).

Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana masyarakat pada banyak LKM, kegiatan penghimpunan dana dijadikan prasyarat bagi adanya pinjaman. Sebagai lembaga pinjaman, LKM berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif maupun untuk kegiatan konsumtif. Bentuk LKM sendiri dapat berupa, lembaga formal seperti bank desa dan koperasi, lembaga semiformal seperti organisasi nonpemerintah dan sumber-sumber informal seperti pelepasuang (Amalia, 2009).

Selama ini LKM merupakan lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan modal UMKM, karena mampu menyesuaikan dengan karakteristik UMKM yang cenderung dianggap tidak bankable oleh sektor perbankan komersial. LKM dianggap mampu memberikan pelayanan pinjaman dalam skala besar tanpa jaminan, tanpa aturan yang ketat, dan dengan cara itu pula